

**KEPEMIMPINAN INOVATIF KEPALA DAERAH  
DI ERA PANDEMI COVID-19  
(Studi Kasus Kepemimpinan Anies Baswedan di Provinsi DKI Jakarta)**

<sup>1\*</sup>Samsul Ode, <sup>2</sup>Hendra Wijayanto, Helen Farida Simanulang, <sup>4</sup>M. Yusran Al-Aufar

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta  
[samsul.ode@uta45jakarta.ac.id](mailto:samsul.ode@uta45jakarta.ac.id)

**Riwayat Artikel**

Dikirim: 11 Januari 2022  
Direvisi: 13 Maret 2022  
Diterima: 30 Juni 2022

**Abstract**

*This study aims to determine the innovative leadership of regional heads in the era of the Covid-19 pandemic (a case study of Anies Baswedan's leadership in DKI Jakarta). The method used in this research is descriptive qualitative. The results of this study indicate that the Governor of DKI Jakarta fulfills all indicators of innovative leadership behavior according to Everett M. Rogers through the innovative PSBB policy in DKI Jakarta. This is shown by making other policy innovations as policy supporters and involving the government, organizations, and the community in supporting the implementation of the PSBB policy. In its implementation, there are obstacles for the DKI Jakarta Provincial Government, namely conflicting policies between the central and regional governments and the low public awareness of the implementation of health protocols. Thus, Anies Baswedan fulfilled all the indicators of innovative leadership with various decisions taken, indicating that Anies Baswedan is an innovative regional head in responding to Covid-19 whose implementation of policies and innovations has resulted in a decrease in the number of active positive cases of Covid-19 in DKI Jakarta.*

**Keywords:** Covid-19; inovasion; Jakarta; leadership; PSBB

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepemimpinan inovatif kepala daerah di era pandemi Covid-19 (studi kasus kepemimpinan Anies Baswedan di DKI Jakarta). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Gubernur DKI Jakarta memenuhi seluruh indikator perilaku kepemimpinan inovatif menurut Everett M. Rogers melalui kebijakan inovatif PSBB di DKI Jakarta. Ditunjukkan dengan membuat inovasi kebijakan lainnya sebagai pendukung kebijakan serta melibatkan pemerintah, organisasi, dan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan kebijakan PSBB. Dalam pelaksanaannya, terdapat kendala bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yaitu kebijakan yang saling berbenturan antara pemerintah pusat dan daerah dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap penerapan protokol kesehatan. Dengan demikian, Anies Baswedan memenuhi seluruh indikator kepemimpinan inovatif dengan berbagai keputusan yang diambil sehingga mengindikasikan bahwa Anies Baswedan merupakan kepala daerah yang inovatif dalam merespon Covid-19 yang pelaksanaan kebijakan dan inovasi tersebut membuahkan hasil dengan menurunnya angka kasus positif aktif Covid-19 di DKI Jakarta.

**Kata kunci:** Covid-19; Inovasi; Jakarta; Kepemimpinan; PSBB

## 1. PENDAHULUAN

Kehadiran pemimpin diharapkan mampu berinovasi guna mendorong pembangunan dan memenuhi kebutuhan masyarakat, serta merespon setiap permasalahan yang terjadi di wilayah pemerintahannya. Pemimpin diharapkan mampu menciptakan dan mengembangkan kebijakan serta program yang kreatif dan inovatif untuk diimplementasikan. Kondisi di setiap daerah dan kebutuhan masyarakat yang berubah secara dinamis, membuat seorang pemimpin di dalam kepemimpinannya diharapkan dapat membuat perkembangan yang dinamis pula, terutama di era pandemi *Covid-19* yang sedang terjadi. Penelitian ini dirasa penting mengingat kondisi darurat akibat penetapan status pandemic *covid-19* menjadi sebuah ujian tersendiri bagi para pemimpin khususnya kepala daerah. Berbagai persoalan baik di skala lokal, nasional maupun global telah memacu para pemimpin untuk berinovasi dan tanggap dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang ada. Riset yang dilakukan oleh Alam (2021) menemukan bahwa Pemerintah Kota Tegal yang selama ini dianggap terlalu terburu-buru oleh pemerintah pusat dalam hal *lockdown* atau yang belakangan disebut PSBB (*Large Scale Social Restriction*) membuktikan kebijakannya berhasil menekan jumlah penyebaran COVID-19 dengan kebijakan karantina wilayah yang diberlakukan mulai 30 Maret hingga 31 Juli 2020. Meski akhirnya PSBB berakhir pada 23 Mei 2020 dengan kenaikan 0 di Kota Tegal. Hal tersebut tidak terlepas dari keberhasilan Walikota Tegal dalam menekan pergerakan COVID-19. Riset yang dilakukan oleh Hanafi (2020) menghasilkan temuan bahwa untuk menghadapi pandemi, para pemimpin lokal melakukan koordinasi dengan pemimpin pusat, mengeluarkan kebijakan-kebijakan publik di daerah, dan mendorong partisipasi aktif warga. Di sisi lain, kinerja para pemimpin daerah terkait pengendalian penyebaran virus di level subnasional juga memunculkan penilaian publik. Penilaian publik ini bisa mendorong prospek kepemimpinan politik para pemimpin lokal ke panggung politik nasional. Riset lain yang dilakukan oleh Ode (2020) melihat contoh kepemimpinan inovatif yang dilakukan Walikota Semarang, Hendrar Prihadi yang mampu mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat dan pemerintah daerah kota Semarang. Berbagai apresiasi dan penghargaan yang diterima oleh pemerintah kota Semarang menjadi bukti bahwa gaya kepemimpinan inovatif Hendrar Prihadi memiliki andil yang baik dalam mengelola tata pemerintahan di kota Semarang di masa pandemi *Covid-19*.

*Covid-19* adalah virus yang menyerang sistem pernapasan pada manusia dan pertama kali terkonfirmasi muncul di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China, pada tanggal 31 Desember tahun 2019. Sejak tanggal 11 Maret 2020, *World Health Organization* (WHO) menyatakan *Covid-19* sebagai pandemi global. Pada tanggal 2 Maret 2020, Presiden Indonesia, Joko Widodo mengumumkan kepada publik bahwa Indonesia positif terinfeksi *Covid-19*. Hal ini ditandai dengan terkonfirmasi dua warga negara Indonesia yang berdomisili di Kota Depok, Jawa Barat. Terinfeksi dua warga tersebut menjadikannya sebagai kasus pertama *Covid-19* di Indonesia (Widaningrum & Wawan, 2020). Di level nasional, dengan adanya krisis yang diakibatkan oleh *Covid-19*,

kepemimpinan seorang kepala daerah diuji untuk dapat mengatasi dan menangani pandemi yang terjadi. Inovasi dalam kepemimpinan harus dikembangkan sesuai dengan keadaan dan situasi yang sedang terjadi.

Melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, *Covid-19* ditetapkan sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat di Indonesia. Pada tanggal 13 April 2020, *Covid-19* ditetapkan sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam. Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai Bencana Nasional, di tingkat daerah dipimpin langsung oleh masing-masing kepala daerah yang menjadi Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* dengan merujuk pada kebijakan pemerintah pusat.

Berdasarkan data yang diperoleh dari situs ([corona.jakarta.go.id](https://corona.jakarta.go.id)), sampai pada tanggal 12 April 2021, tercatat jumlah kasus terkonfirmasi kasus *Covid-19* di Provinsi DKI Jakarta adalah 392.598 kasus positif, 3.321 dirawat, dan 379.210 sembuh. Dengan total kasus tersebut, menjadikan Provinsi DKI Jakarta sebagai provinsi dengan jumlah kasus tertinggi di Indonesia. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan kemudian mengeluarkan kebijakan pembatasan mobilitas sosial untuk menanggulangi persoalan yang ditimbulkan dari penetapan status pandemi *Covid-19* oleh pemerintah pusat. Kebijakan pembatasan mobilitas sosial yang dikeluarkan dikenal dengan nama Penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kebijakan ini dilandasi oleh Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020. Provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi pertama di Indonesia yang melaksanakan kebijakan mobilitas sosial dan diwujudkan dalam bentuk pembatasan aktivitas di luar rumah yang dilakukan oleh setiap orang yang berdomisili dan atau berkegiatan di Provinsi DKI Jakarta. Selama pemberlakuan PSBB, setiap orang diwajibkan melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan menggunakan masker di luar rumah.

Dalam kebijakan PSBB, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan inovasi melalui tiga fase, yakni *testing*, *tracing*, dan *fencing*. Berdasarkan rilis dari portal [corona.jakarta.go.id](https://corona.jakarta.go.id), kebijakan PSBB di Provinsi DKI Jakarta dibagi dalam lima fase, yakni PSBB Fase 1, PSBB Transisi (*New Normal*), PSBB Ketat, PSBB Transisi Fase II, serta PSBB Ketat. Pemberitaan dari portal berita Kompas.com (2020), Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta memaparkan bahwa penerapan PSBB terbukti efektif menekan angka laju kasus aktif penyebaran virus *Covid-19*. Pada tanggal 07 Februari 2021, angka kasus positif aktif di Jakarta mencapai 23.869 kasus. Selanjutnya, dalam perpanjangan PSBB Transisi Fase II, angka kasus positif aktif secara signifikan menurun menjadi 13.309 kasus pada tanggal 21 Februari 2021. Penurunan kasus aktif juga dipengaruhi oleh peningkatan angka kesembuhan dari meningkatnya angka kesembuhan pasien berpengaruh pada menurunnya tingkat keterisian tempat tidur dan *ICU* di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini memaparkan secara deskriptif mengenai kepemimpinan inovatif

dan upaya yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan pada masa pandemi *Covid-19* melalui kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Provinsi DKI Jakarta. Rumusan pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimana kepemimpinan inovatif anies baswedan dalam menanggulangi kasus *Covid-19* di DKI Jakarta dan apa saja yang menjadi kendala maupun hambatan dalam penerapan kebijakan pembatasan mobilitas sosial di provinsi DKI Jakarta pada masa pandemic *Covid-19*.

## **2. KERANGKA TEORI**

### **2.1 Kepemimpinan Inovatif**

Kepemimpinan inovatif adalah kegiatan seorang pemimpin dalam rangka berinovasi, meningkatkan dan mengembangkan untuk menghasilkan perubahan yang lebih baik dari keadaan sebelumnya dalam suatu organisasi yang dipimpinnya untuk mengarah pada pencapaian tujuan bersama yang diinginkan (Chalim, dkk, 2012). Rogers (1983) sebagaimana dikutip oleh Mulyana (2003), menjelaskan bahwa perilaku kepemimpinan yang inovatif efektif akan melibatkan tiga perhatian atau tujuan, yakni:

1. Berorientasi tugas.

Perilaku ini terutama berfokus terutama pada penyelesaian tugas, menggunakan staf dan sumber daya secara efisien, dan mempertahankan operasi yang teratur dan dapat diandalkan.

2. Berorientasi hubungan.

Jenis perilaku ini terutama memperhatikan meningkatkan hubungan dan membantu orang, meningkatkan kolaborasi dan kerjatim, meningkatkan kepuasan kerja, dan menciptakan identifikasi dengan organisasi.

3. Berorientasi perubahan.

Jenis perilaku ini terutama memperhatikan perbaikan keputusan strategis, beradaptasi terhadap perilaku lingkungan, meningkatkan fleksibilitas dan inovasi, membuat perubahan dasar di bidang proses, produk, dan jasa, dan mendapatkan komitmen terhadap perubahan.).

## **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif tipe studi kasus. Tipe penelitian studi kasus berusaha menemukan makna, menyelidiki proses, dan memperoleh pengertian dan pemahaman yang mendalam dari individu, kelompok atau situasi (Emzir, 2012). Penelitian ini secara deskriptif menjabarkan tentang kepemimpinan inovatif dan upaya yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan pada masa pandemi *Covid-19* melalui kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan sumber-sumber sekunder berupa data dan referensi yang

relevan dengan topik penelitian ini seperti jurnal penelitian, buku, peraturan hukum, dan dokumentasi pemberitaan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui analisa sumber-sumber tertulis berupa dokumen dan referensi lainnya. Teknik analisis data menggunakan metode analisis data kualitatif tipe analisis naratif yang menganalisis atau meneliti mengenai kumpulan deskripsi suatu peristiwa atau fenomena yang terjadi. Instrument dalam penelitian ini meliputi dokumentasi dan pengamatan/observasi.

## **4. PEMBAHASAN**

### **4.1 Kepemimpinan Inovatif Anies Baswedan di masa Pandemi Covid-19**

#### **4.1.1 Berorientasi tugas**

Dalam merespon kasus *Covid-19*, Anies Baswedan memanfaatkan seluruh aspek yang dimiliki pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka untuk melaksanakan inovasi kebijakan PSBB. Hal tersebut dilakukan untuk menggiatkan pemeriksaan secara massif melalui metode *active case finding*, yakni metode dengan aktif mencari orang-orang yang berstatus terkonfirmasi Covid-19 tanpa gejala melalui tahap *testing*, *tracing*, dan *fencing*. Tahap pertama dalam menangani penyebaran *Covid-19* adalah *testing* (pengujian) yang dilakukan pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui kerja sama dengan *Harvard CLM Team* dan *Klakklik.id* dalam mengembangkan aplikasi *Corona Likelihood Metric* (CLM), yakni inovasi uji risiko *corona* mandiri gejala *Covid-19* dengan menggunakan teknologi *machine learning* yang dirancang sebagai kontrol masyarakat di Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Layanan *Smart City* bekerja sama dengan *Cartenz Group* mengembangkan aplikasi yang merupakan inovasi dalam pelacakan virus *corona* dalam memudahkan langkah *tracing* riwayat kunjungan pasien positif *Covid-19* dengan tujuan memudahkan pemerintah dalam mengidentifikasi wilayah yang rentan dan perlu mendapat perhatian lebih lanjut.

Berdasarkan Siaran Pers Nomor 1414/SP-HMS/07/2020, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan Dewan Riset Daerah (DRD) DKI Jakarta memanfaatkan GOR Pademangan sebagai fasilitas bilik isolasi mandiri bagi warga terinfeksi *Covid-19*. GOR tersebut dibangun 20 bilik isolasi mandiri. GOR tersebut dibagi menjadi dua sisi, yakni sisi barat GOR diperuntukkan bagi pasien laki-laki, sedangkan sisi timur GOR diperuntukkan bagi pasien wanita yang dilengkapi Mesin Purifikasi Udara Anti *Covid-19* Nano Teknologi hasil karya inovasi DRD DKI Jakarta yang bekerja sama dengan PT.Nanobubble Karya Indonesia yang diberi nama *Nanobubble-ATTACT*. GOR juga dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas seperti toilet khusus pasien dan petugas yang dibangun secara terpisah dan wastafel/tempat cuci tangan yang dibangun di beberapa sudut GOR ([PPDI.jakarta.go.id](http://PPDI.jakarta.go.id)). Dilansir dari saluran kanal YouTube BNPB Indonesia (2020), dalam wawancara yang dilakukan dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, dr. Widyastuti, MKM, sebagai upaya penanganan *Covid-19*, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menyediakan hotel sebagai lokasi isolasi mandiri

pasien *Covid-19* yang terbagi 2 jenis, yakni hotel fasilitas pemerintah terkendali tak berbayar serta hotel fasilitas terkendali berbayar. Dalam hotel fasilitas pemerintah, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memanfaatkan sumber daya keuangan yang bersumber dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Berdasarkan data dari laman *covid19.go.id* (2020), terdapat 5 hotel yang digunakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi tempat isolasi mandiri, yakni sebagai berikut:

- a. IBIS Jakarta Senen (Jakarta Pusat)
- b. *U Stay* Mangga Besar (Jakarta Pusat)
- c. *Twin Plaza* (Jakarta Barat)
- d. Grand Asia (Jakarta Utara)
- e. IBIS *Styles* Jakarta Mangga Dua (Jakarta Utara)

Melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemprov DKI Jakarta berkolaborasi dengan Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) untuk menyediakan hotel-hotel di Jakarta sebagai tempat hotel fasilitas terkendali berbayar. Kolaborasi tersebut juga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi sektor hotel yang terdampak akibat pandemi serta memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan isolasi mandiri. Karena sistemnya berbayar, maka hotel-hotel yang dijadikan tempat isolasi mandiri tidak akan mendapatkan subsidi dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, melainkan dari pasien yang melakukan isolasi. Hotel yang dijadikan tempat isolasi mandiri telah diberikan pembekalan oleh PHRI sesuai dengan protokol kesehatan untuk memastikan fasilitas memenuhi kriteria tempat isolasi mandiri. Dikutip dari laman *covid19.go.id* (2020), PHRI merinci hotel yang dijadikan sebagai tempat isolasi mandiri, yakni 14 hotel di Jakarta Pusat, 5 hotel di wilayah Jakarta Selatan, 5 hotel di wilayah Jakarta Barat, dan 6 hotel di wilayah Jakarta Utara. Berikut daftar beberapa nama hotel per wilayah di DKI Jakarta:

- a. *Max One* Sabang (Jakarta Pusat) \
- b. *Kuretakeso* Kemang (Jakarta Selatan)
- c. *Max One* Pemuda (Jakarta Timur)
- d. *Royal Palm* Cengkareng (Jakarta Barat)
- e. *Pop Hotel* Kelapa Gading (Jakarta Utara)

Dilansir dari portal resmi *smartcity.go.id* (2020), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga berkoordinasi dengan pengelola Graha Wisata Ragunan untuk menjadikan graha sebagai tempat penginapan bagi tenaga medis yang menangani pasien *Covid-19* yang selanjutnya dialihfungsikan menjadi fasilitas isolasi terkendali bagi pasien *Covid-19* berstatus Orang Tanpa Gejala (OTG). Pada saat menjadi tempat penginapan bagi tenaga medis, tersedia 83 kamar dengan kapasitas 298 orang. Tiap kamar terdiri dari 2 tempat tidur dan 6 tempat tidur. Setelah dialihfungsikan menjadi fasilitas isolasi terkendali

pasien *Covid-19*, dipersiapkan 76 kamar isolasi seluas 5x4 meter yang memiliki kapasitas menampung 152 pasien. (*liputan6.com*). Setiap kamar yang dipersiapkan akan menampung 2 pasien. Tempat isolasi tersebut difasilitasi jaringan internet gratis (*Wifi*), televisi, lemari, pendingin ruangan, kamar mandi di dalam kamar, dan fasilitas laundry. Pihak Graha Wisata Ragunan sebagai tempat isolasi juga membangun koordinasi dengan Puskesmas-puskesmas terkait dengan penerimaan pasien *Covid-19* dengan kategori OTG yang akan ditempatkan di Graha Ragunan. Apabila terdapat pasien yang akan diisolasi ke Graha Wisata Ragunan, maka pihak Puskesmas akan melakukan konfirmasi melalui telepon ke pihak Graha Ragunan dan selanjutnya pasien akan diantarkan ke tempat isolasi sehingga mempermudah dalam tahap *fencing*.

Pandemi *Covid-19* di Provinsi DKI Jakarta selain menimbulkan krisis kesehatan, juga memberikan dampak krisis bagi perekonomian masyarakat. Mensiasati hal tersebut, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengeluarkan Program Bantuan Sosial Pembatasan Sosial Berskala Besar atau Bansos PSBB. Pada implementasi PSBB di Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memanfaatkan sumber daya keuangan dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) DKI Jakarta dan Kementerian Sosial yang dimanfaatkan untuk pelaksanaan program bansos berupa paket sembako yang dibagikan kepada 1,2 juta keluarga dengan sasaran keluarga yang rentan terkena dampak dari pandemi *Covid-19*. Sumber daya keuangan tersebut merupakan modal suatu kebijakan yang mendukung semua aktivitas dan fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan suatu program. Selanjutnya sumber daya yang dimanfaatkan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam implementasi PSBB adalah sumber daya sistem yang mempermudah berbagai pihak, seperti fasilitator, kolaborator, maupun agregator. Hal tersebut dengan diwujudkan melalui pembuatan portal *corona.jakarta.go.id* untuk dimanfaatkan semua pihak jejaring. Untuk mempermudah warga Jakarta yang ingin bertanya, memberikan saran, atau memberikan laporan terkait pelaksanaan PSBB di DKI Jakarta. Laman *corona.jakarta.go.id/kolaborasi* dikembangkan untuk mempermudah program Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB), yakni inovasi program yang digagas oleh Anies Baswedan sebagai pendukung kebijakan PSBB. Sistem ini memudahkan fasilitator untuk mempertemukan pemberi bantuan (agregator) dengan warga, serta melakukan pendampingan dan memonitoring panyaluran bantuan program KSBB sehingga memangkas alur birokrasi agar lebih efisien.

#### **4.1.2 Berorientasi hubungan**

Dalam hal memperhatikan tingkat hubungan dalam membantu kesehatan dan kebutuhan masyarakat, Anies Baswedan menciptakan kebijakan dan inovasi yang berpihak pada kesehatan dan kebutuhan masyarakat DKI Jakarta. Jumlah peralatan kesehatan bagi para tenaga kesehatan di DKI Jakarta dalam perang melawan pandemi *Covid-19* masih belum memadai ditambah dengan jumlah tenaga kesehatan yang terbatas dalam menangani pasien *Covid-19* disebabkan angka kasus positif *Covid-19* yang tinggi.

Dalam mensiasati kebutuhan tenaga kesehatan akan peralatan kesehatan serta menambah jumlah tenaga kesehatan, maka pemerintah Provinsi DKI Jakarta berinisiatif menyediakan program bagi masyarakat yang ingin berkontribusi sebagai relawan maupun menyumbangkan peralatan medis yang dibutuhkan bagi para tenaga kesehatan dalam melawan virus *Covid-19*. Dalam tujuan membantu para tenaga kesehatan, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga berupaya untuk meningkatkan kerja tim dengan membangun kerja sama dan kolaborasi dengan berbagai pihak, seperti individu (masyarakat) maupun pihak swasta. Hal ini diwujudkan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi melalui program Kolaborasi Tanggap Darurat yang dikelola oleh Jakarta *Development Collaboration Network* (JDCN).

Inovasi dalam kerja sama tersebut didasari oleh masyarakat Indonesia yang dikenal dengan budaya gotong royongnya, sehingga budaya tersebut diterapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam program melawan pandemi *Covid-19*. Dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, kerja sama dengan pihak swasta juga dibutuhkan dan diwujudkan melalui kerja sama dengan Forum CSR DKI Jakarta yang melibatkan mitra dari dunia usaha, bisnis, dan organisasi olahraga untuk mendukung Pemerintah Jakarta dalam mencegah penyebaran *Covid-19*. Melalui Forum CSR DKI Jakarta, terdapat 6 mitra yang terlibat memberikan bantuan, yakni *Danone* Indonesia menyerahkan Alat Pelindung Diri (APD) berupa masker sebanyak 5.000 buah dan 60.000 botol air mineral, PT Rifan Financindo Berjangka menyerahkan 200 paket sembako, Persatuan Golf Indonesia menyerahkan 1.000 paket sembako, PT TEP-Migas Thailand menyerahkan 10.000 masker dan 1.500 Alat Pelindung Diri (APD), Bank Indonesia menyerahkan 20.000 masker, dan Baitul Hidayatullah menyerahkan 10.000 masker (*mediaindonesia.com*,2020). Bantuan yang diserahkan kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang kemudian ditujukan bagi tenaga kesehatan, pasien *Covid-19*, serta masyarakat yang terdampak pandemi, yakni pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Forum CSR DKI Jakarta juga menyerahkan 10 sarana sterilisasi yang ditempatkan di Balai Kota Jakarta.

Dikutip dari laman *forumcsrjdkijakarta.org* (2020), selain memberikan bantuan yang esensial bagi tenaga kesehatan dan masyarakat, Forum CSR DKI Jakarta juga melakukan aksi sebagai bentuk mendukung program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menyosialisasikan pesan penggunaan masker melalui Gerakan Bersama Pakai Masker atau GEBRAK MASKER oleh Tim Penggerak PKK DKI Jakarta. Bentuk dukungan tersebut dengan penyerahan bantuan oleh Forum CSR DKI dan Kepala Dinas DKI Jakarta sebanyak 5.000 masker kain kepada Ketua Tim Penggerak PKK DKI Jakarta. Selain membantu tenaga kesehatan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menyediakan wadah bagi masyarakat yang ingin membantu sesama melalui Program Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB) adalah sebuah inovasi program kolaborasi sosial untuk bahu-membahu membantu sesama dalam menghadapi pandemi *Covid-19*, dengan mempertemukan antara masyarakat yang ingin memberikan dan masyarakat yang membutuhkan bantuan melalui fasilitasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang digagas

oleh Anies Baswedan. Terdapat 4 program KSBB, yakni KSBB UMKM, KSBB Pendidikan, KSBB Pangan, dan KSBB Penataan Pemukiman (Fadhil Akmal, 2021). KSBB merupakan program yang diciptakan oleh Anies Baswedan dan menjadi suatu terobosan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai upaya mendorong pemulihan perekonomian akibat dampak dari *Covid-19*.

Program pertama yang dilakukan, yakni program KSBB UMKM adalah bantuan yang dikhususkan untuk mendukung pelaku usaha kecil dan menengah di Jakarta. Dalam program ini, Pemerintah Provinsi DKI menawarkan tiga alternatif paket rekomendasi, yakni Paket Sarana Prasarana, Paket Pinjaman Modal, serta Paket Pelatihan. Program kedua adalah program KSBB Pendidikan yang merupakan program dengan tujuan untuk mewujudkan pemerataan akses pendidikan. Melihat masih belum meratanya kepemilikan gawai yang memadai bagi pendidik dan peserta didik sebagai akses dalam kegiatan belajar mengajar di rumah selama pandemi *Covid-19*, sehingga melalui program ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajak masyarakat agar berkontribusi bersama dalam pemerataan akses pendidikan di Jakarta melalui program KSBB Pendidikan. Ada 2 alternatif paket referensi yang disediakan, yaitu Paket Gawai Pendidikan dan Paket Gawai Peserta Didik. Selama pelaksanaan PSBB, program KSBB Pendidikan telah berhasil membantu sebanyak 3.755 sekolah, 12.542 guru, dan 171.001 siswa. Program ketiga adalah KSBB Pangan dimana program ini difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bagi masyarakat yang ingin memberikan bantuan bagi sesama. Program ini menyasar bagi yayasan atau komunitas yang memerlukan bantuan akibat dampak dari pandemi, seperti panti asuhan, panti disabilitas, panti jompo, dan lokasi yang menjadi prioritas lainnya. Masyarakat yang ingin memberikan bantuan secara langsung, pemerintah memfasilitasi dengan mengakses *platform* KSBB Pangan yakni melalui tautan [corona.jakarta.go.id/kolaborasi](https://corona.jakarta.go.id/kolaborasi), dan menentukan lokasi pendistribusian bantuan serta memilih paket bantuan yang akan diberikan. Program terakhir adalah KSBB Penataan Permukiman yang bertujuan untuk menciptakan tempat tinggal yang sehat dan aman. Program ini terdiri dari 3 paket, yakni Paket Penataan RW Utama, Paket penataan RW Lengkap, serta Paket penataan RW Bersama.

Berdasarkan Siaran Pers Nomor 1790/SP-HMS/12/2020, sebagai upaya mengendalikan penyebaran *Covid-19*, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membantu memberikan edukasi bagi masyarakat melalui kerja sama dan melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Perkumpulan Sahabat Peduli Bangsa Maju mengenai program Gerakan Pakai Masker. Gerakan Pakai Masker (GPM) merupakan kegiatan untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kedisiplinan memakai masker untuk melindungi diri sendiri dan orang lain, terutama saat melakukan aktivitas di luar rumah. Program ini bertujuan menciptakan gerakan masyarakat untuk mendukung upaya pemerintah memerangi pandemi dan mengubah pesan mengenai krisis kepada masyarakat melalui pesan edukatif yang lebih sederhana agar mudah dipahami (PPDI.jakarta.go.id,2020). Dengan pandemi yang terjadi, penanganan masalah kesehatan saat ini harus dilakukan secara efektif. Di antaranya dengan melakukan kerja

sama yang berfokus pada pelaksanaan edukasi dan kampanye publik secara masif terkait dengan penggunaan masker sebagai langkah dalam penanganan *Covid-19* di Provinsi DKI Jakarta. Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Program Penyuluhan Penyuluh (PUP) di berbagai klaster masyarakat, yakni pelaku UMKM, pedagang serta pengurus pasar, kader kesehatan (termasuk Puskesmas), Aparatur Sipil Negara (ASN), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pesantren, petugas tempat wisata, serta pengurus RT dan RW maupun usaha;
- b. Pelaksanaan edukasi bagi masyarakat melalui akun Media Sosial Pemprov DKI Jakarta, OPD dan BUMD DKI Jakarta, serta Gerakan Pakai Masker (GPM) dan mitra GPM;
- c. Pelaksanaan edukasi bagi masyarakat melalui melalui videotron serta media digital milik MRT, LRT, dan Transjakarta;
- d. Membangun kerja sama dengan kedutaan besar negara-negara sahabat yang berlokasi di DKI Jakarta;
- e. Program Swasembada masker melalui pembuatan masker secara mandiri dengan spesifikasi sesuai standar bagi kelompok masyarakat tertentu;
- f. Melibatkan influencer, tokoh masyarakat, dan tokoh agama untuk ikut serta menjadi penggerak dalam kegiatan edukasi bagi masyarakat.

Kerja sama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Perkumpulan Sahabat Peduli Bangsa Maju melalui program Gerakan Pakai Masker (GPM) merupakan bentuk kegiatan inovasi dalam memberikan edukasi dan kampanye kepada publik mengenai pentingnya memakai serta mematuhi protokol kesehatan yang juga menjadi kunci dari pengendalian dan penanganan *Covid-19* di DKI Jakarta. Perkumpulan Sahabat Peduli Bangsa Maju adalah organisasi nirlaba independen yang meluncurkan Program Pakai Masker Indonesia dan Gerakan *Rebranding* di tengah pandemi *Covid-19* (*beritajakarta.id,2020*).

#### **4.1.3 Berorientasi Perubahan**

Untuk menjamin penerapan PSBB berjalan sesuai ketentuan, Anies Baswedan membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* Tingkat Provinsi yang dipimpin langsung oleh Gubernur, membentuk Satuan Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* di Tingkat RW yang dipimpin oleh masing-masing RW yang bertugas melakukan patroli di permukiman penduduk melalui kerja sama dengan karang taruna untuk memastikan masyarakat melaksanakan protokol kesehatan, serta melakukan sosialisasi 3M (Memakai masker, Mencuci tangan, dan Menjaga jarak), serta membentuk Kampung Siaga Lawan *Covid-19* di tiap RT dan RW yang berfungsi mengawasi penerapan protokol kesehatan di wilayah permukiman melalui pembatasan aktivitas warga setiap RW dengan mengurangi pintu masuk dan keluar serta membuat pos

penjagaan, portal, menyiapkan fasilitas cuci tangan, *hand sanitizer*, serta sabun. Selain itu juga dilakukan disinfektan di tiap-tiap kampung dan melakukan pendataan bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial.

Dengan adanya pos penjagaan di wilayah permukiman di tingkat RT dan RW yang terintegrasi ke Puskesmas di masing-masing wilayah, membantu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam tahap *fencing* (pembatasan gerak) melalui monitoring sehingga pasien *Covid-19* dapat cepat ditangani, sehingga menekan lajunya tingkat penularan dan tingkat kematian serta mengantisipasi terjadinya pelanggaran sedini mungkin. Pandemi *Covid-19* yang sedang terjadi juga membuat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus beradaptasi terhadap perilaku lingkungan dalam memberikan pelayanan. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, berusaha melakukan upaya untuk menciptakan kebijakan serta implementasi berbagai inovasi dengan tujuan membangun kepercayaan masyarakat dan lingkungan pemerintahannya meski di tengah pandemi melalui keterbukaan mengenai informasi publik dengan mengutamakan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan PSBB, serta inovasi dan program pendukung, terutama dalam pelayanan digital pada pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta. Adaptasi tersebut merupakan perubahan dasar yang dilatarbelakangi pemberlakuan PSBB di DKI Jakarta, dimana aktivitas masyarakat dibatasi namun kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik tetap harus bergerak, maka hal ini menjadi pendorong bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menciptakan berbagai inovasi dalam layanan digital. Salah satu contoh yang dilakukan adalah mengembangkan fitur Jejak dalam aplikasi JAKI. Ini dilakukan untuk menjamin aktivitas pelayanan publik tetap berjalan meski di tengah pandemi *Covid-19* ([smartcity.jakarta.go.id](http://smartcity.jakarta.go.id),2020). Adaptasi tersebut terbukti maksimal, ditandai dengan Provinsi DKI Jakarta menjadi juara pertama melalui aplikasi JAKI dalam kompetisi Nasional Program Indonesia *Entrepreneur* TIK atau IdenTIK 2020 untuk kategori layanan publik dalam lomba yang digelar oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi. Mendapatkan komitmen terhadap perubahan dalam kepemimpinan inovatif Gubernur Anies Baswedan di era pandemi *Covid-19* merupakan aspek yang telah terlaksana di bawah kepemimpinan inovatif Anies Baswedan, yakni dengan pemberlakuan kebijakan PSBB dimana kebijakan tersebut terbukti efektif dapat menekan dan menurunkan angka laju kasus positif aktif *Covid-19* di DKI Jakarta. Kasus positif aktif *Covid-19* pada 7 Februari 2021 mencapai 23.869 secara signifikan menurun dalam waktu dua minggu menjadi 13.309 pada 21 Februari 2021. Penurunan angka kasus aktif dipengaruhi oleh peningkatan angka kesembuhan pasien *Covid-19*. Selain peningkatan angka kesembuhan pasien, menurunnya angka kasus aktif juga disumbangkan dari meningkatnya angka kesembuhan pasien *Covid-19* yang juga berpengaruh pada menurunnya tingkat keterisian tempat tidur BOR (*Bed Occupancy Rate*) ruang isolasi di DKI Jakarta menjadi 66% yang sebelumnya mencapai 72% dan ICU menjadi 71% yang sebelumnya mencapai 74%.

## **4.2 Hambatan dalam Implementasi PSBB di DKI Jakarta**

### **4.2.1 Kebijakan yang saling berbenturan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah**

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah saling berbenturan dan tidak konsisten, sehingga menyebabkan kinerja birokrasi tidak berjalan efektif yang berakibat terkendalanya implementasi PSBB dalam upaya menghadapi pandemi Covid-19. Misalnya, pada tanggal 7 April 2020, Kementerian Perindustrian mengeluarkan Surat Edaran Menteri Perindustrian Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Operasional Pabrik dalam Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 yang bertujuan menjamin kegiatan industri tetap dapat berlangsung meski di tengah penerapan PSBB. Sebelumnya, pada 4 April 2020, Menteri Kesehatan telah menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Sejalan dengan itu, tanggal 10 April 2020, DKI Jakarta mulai memberlakukan kebijakan PSBB dengan membatasi aktivitas masyarakat di luar rumah, salah satunya aktivitas di tempat kerja. Dengan diterbitkannya Surat Edaran Menteri Perindustrian, banyak pabrik atau industri, termasuk 200 industri non-esensial, masih beroperasi serta masih banyak warga yang melakukan aktivitas di tengah pelaksanaan PSBB yang dalam aturannya menghentikan aktivitas di perkantoran maupun industri. Akibat dari dualisme kebijakan di tingkat Peraturan Menteri, Pemprov DKI Jakarta sulit menjatuhkan sanksi bagi industri yang masih beroperasi karena adanya izin dari Kementerian Perindustrian. Dengan pemerintah masih membuat kebijakan yang berbenturan dan memunculkan ambiguitas dalam pelaksanaannya, berimbas pada sektor transportasi, khususnya KRL rute Jabodetabek yang masih tetap beroperasi. Hal ini membuat mobilitas masyarakat masih tinggi, terutama para pekerja. Penumpang tidak dapat mengatur jarak karena terjadinya kepadatan akibat dari sektor industri yang tetap beroperasi, karena sebagai pusat perekonomian, DKI Jakarta menarik pergerakan pekerja dalam jumlah besar dari kota-kota penyangga (republika.co.id,2020).

### **4.2.2 Rendahnya kepatuhan masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan**

Hasil survei yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (2020) dengan fokus pada perilaku masyarakat di masa pandemi Covid-19 untuk mengetahui tingkat kepatuhan masyarakat terhadap penerapan protokol kesehatan dan aturan selama PSBB didapati hasil sebanyak 55% atau lebih dari setengah responden menilai tidak adanya sanksi menjadi alasan masyarakat untuk tidak melaksanakan protokol kesehatan, 39% responden mengatakan minimnya kejadian Covid-19 di lingkungan sekitar menjadi alasan untuk masyarakat tidak mengikuti protokol kesehatan, 33% responden mengatakan bahwa aparat atau pimpinan mereka tidak memberikan contoh dalam menerapkan protokol kesehatan, 23% mengatakan mahalnnya harga masker, face-shield, hand sanitizer

atau APD, 21% beralasan mengikuti orang lain, dan 15% responden berpendapat kurangnya kesadaran dalam menjalankan protokol kesehatan

## **5. KESIMPULAN**

Kepemimpinan inovatif yang diterapkan Anies Baswedan dilaksanakan dengan pengambilan setiap keputusan dan inovasi kebijakan dalam upaya memutus rantai penyebaran pandemi *Covid-19*. Anies Baswedan merupakan pemimpin yang memandang bahwa inovasi adalah salah satu instrumen keberhasilan suatu perubahan yang diwujudkan melalui pelaksanaan kebijakan PSBB yang dilandasi Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 yang dipilih untuk menghadapi pandemi *Covid-19* di DKI Jakarta sesuai ketetapan pemerintah pusat sebagai upaya dalam memutus mata rantai dan penanganan *Covid-19*. Kesimpulan akhir dari riset ini diuraikan sebagai berikut :

1. Dalam berorientasi tugas, Anies Baswedan melaksanakan tahap *testing* dan *tracing* melalui kerja sama dengan *Harvard CLM Team* dan *Klakklik.ID* mengembangkan aplikasi CLM dan JEJAK..
2. Dalam berorientasi hubungan, Anies Baswedan berkolaborasi dengan JDCN membuat program Kolaborasi Tanggap Darurat. Pemrov DKI Jakarta juga bekerja sama dengan Forum CSR DKI Jakarta melalui pemberian bantuan APD dan paket sembako yang ditujukan bagi tenaga kesehatan, pasien *Covid-19*, serta pekerja yang terkena PHK akibat dampak dari pandemi, memberikan sarana sterilisasi untuk Balai Kota Jakarta, serta menyosialisasikan penggunaan masker melalui Gerakan Bersama Pakai Masker.
3. Dalam berorientasi perubahan, Anies Baswedan membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* di Tingkat Provinsi untuk memonitoring pelaksanaan PSBB di tingkat Provinsi, membentuk Kampung Siaga Lawan *Covid-19* untuk membatasi aktivitas warga di tiap RW, serta membentuk Satuan Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* yang bekerja sama dengan karang taruna untuk melakukan patroli di lingkungan permukiman. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga mengembangkan fitur Jejaki dalam aplikasi Jaki, dan komitmen terhadap perubahan dibuktikan dengan menurunnya laju kasus positif *Covid-19* melalui kebijakan PSBB.
4. Dalam penerapan PSBB, terdapat hambatan yakni kebijakan di tingkat Peraturan Menteri yang saling berbenturan sehingga memunculkan ambiguitas bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan PSBB, serta rendahnya kepatuhan masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan.

## 6. REFERENSI

- Akmal, F. (2021). Implementasi Program Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Upaya Peningkatan dan Percepatan Pemulihan Ekonomi DKI Jakarta di Masa Pandemi *Covid-19*. Skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi. Jurusan Administrasi Publik. Malang: Universitas Brawijaya.
- Alam, Mochamad Doddy Syahirul dkk (2021) Kepemimpinan Dalam Krisis *COVID-19*: Pembelajaran dari Tegal. *Spirit Publik : Jurnal Administrasi Publik*. Vol. 16 No.1
- Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. (2021). *Provinsi DKI Jakarta dalam Angka 2021*. Jakarta: CV. Nasional Indah.
- Chalim, A.S., dkk. (2012). Urgensi Kepemimpinan Inovatif: Menyiapkan Sekolah Bernuansa Islam Tetap Eksis di Era Globalisasi. Surabaya: Ponpes Jagad 'Alimussirry.
- Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik DKI Jakarta. (2020). Kolaborasi DRD, Pemprov DKI Sediakan Bilik Isolasi Mandiri Berpenyaring Udara Anti Covid-19 (Siaran Pers Nomor 1414/SP-HMS-07/2020). Diakses dari <https://ppid.jakarta.go.id/detail/719/4899>.
- Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik DKI Jakarta. (2020). Siaran Pers tentang Dukong Gerakan Pakai Masker, Pemprov DKI Berkolaborasi dengan Perkumpulan Sahabat Peduli Bangsa Maju. (Siaran Pers Nomor 1790/SP-HMS-12/2020). Diakses dari <https://ppid.jakarta.go.id/detail/719/5270>.
- Gerardus. (2020, Agustus 26). Forum CSR DKI Jakarta Mendukung Gerakan Bersama Pakai Masker!. [Forumcsrdkijakarta.org](https://forumcsrdkijakarta.org). Diakses dari <https://forumcsrdkijakarta.org/2020/08/26/forum-csr-dki-jakarta-mendukung-gerakan-bersama-pakai-masker-gebrak-masker/>.
- Hanafi, Ridho Imawan dkk (2020) Kepemimpinan Lokal di Masa Pandemi Covid-19: Respons, Kebijakan, Dan Panggung Elektoral. *Jurnal Penelitian Politik LIPI* Vo.17 No.2
- Hanggara, A.G. (2020). JAKI Juara IdenTIK 2020. [Smartcity.jakarta.go.id](https://smartcity.jakarta.go.id). Diakses dari <https://smartcity.jakarta.go.id/blog/600/jaki-juara-identik-2020>.
- Hanggara, A.G. (2020). Jejak: Fitur Baru JAKI pada Masa Pandemi, Apa Saja Fungsinya?. [Smartcity.jakarta.go.id](https://smartcity.jakarta.go.id). Diakses dari <https://smartcity.jakarta.go.id/blog/586/jejak-fitur-baru-jaki-pada-masa-pandemi-apa-saja-fungsinya>.
- Hanggara, A.G. (2020, Mei 29). Linimasa Kebijakan Penanganan Pandemi *Covid-19* di Jakarta. [Corona.jakarta.go.id](https://corona.jakarta.go.id). Diakses dari

<https://corona.jakarta.go.id/id/artikel/inimasa-kebijakan-penanganan-pandemi-covid-19-di-jakarta>.

- Haryono, S. (2015). *Intisari Teori Kepemimpinan*. Bekasi: PT. Intermedia Personalia Utama.
- Irwan, N. (2013). *Desain Inovasi Pemerintahan Daerah*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Iskandar, R.A. (2020, Desember 10). *Dukung Gerakan Pakai Masker, Pemprov DKI Berkolaborasi dengan Perkumpulan Sahabat Peduli Bangsa Maju*. *Beritajakarta.id*. Diakses dari <https://www.beritajakarta.id/read/85413/Dukung-gerakan-pakai-masker-pemprov-dki-berkolaborasi-dengan-perkumpulan-sahabat-peduli-bangsa-maju#.YUKrKp0zbDc>.
- Kasus Terkonfirmasi *Covid-19* DKI Jakarta. (2021, April 12). *Corona.jakarta.go.id*. Diakses dari <https://corona.jakarta.go.id>.
- Kementerian Kesehatan. (2020). *Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. (Permenkes Nomor 9 Tahun 2020). Jakarta: Penulis. Diakses dari [http://hukor.kemkes.go.id/uploads/produk\\_hukum/PMK\\_No\\_9\\_Th\\_2020\\_ttg\\_Pedoman\\_Pembatasan\\_Sosial\\_Berskala\\_Besar\\_Dalam\\_Penanganan\\_COVID-19.pdf](http://hukor.kemkes.go.id/uploads/produk_hukum/PMK_No_9_Th_2020_ttg_Pedoman_Pembatasan_Sosial_Berskala_Besar_Dalam_Penanganan_COVID-19.pdf).
- Kementerian Perindustrian. (2020). *Surat Edaran Menteri Perindustrian tentang Pelaksanaan Operasional Pabrik dalam Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019*. (Surat Edaran Menteri Perindustrian Nomor 4 Tahun 2020). Diakses dari [http://jdih.kemenperin.go.id/site/baca\\_peraturan/2634](http://jdih.kemenperin.go.id/site/baca_peraturan/2634).
- Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2020). *Keputusan Presiden tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional (KEPPRES Nomor 12 Tahun 2020)*. Jakarta: Penulis. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/135718/keppres-no-12-tahun-2020>.
- Megapolitan. (2020, April 05). *Forum CSR DKI dan Pemprov DKI Jakarta Kolaborasi Tangani Covid-19*. *MediaIndonesia.com*. Diakses dari <https://mediaindonesia.com/megapolitan/301418/forum-csr-dki-dan-pemprov-dki-jakarta-kolaborasi-tangani-covid-19>.
- Metrotvnews. (2020, September 24). *Prosedur Isolasi OTG COVID-19, Mudah atau Sulitkah?* [Video]. YouTube. Diakses dari <https://www.youtube.com/watch?v=TbIT2TYACXQ>.
- Muharam, R.S. & F. Melawati. (2019). *Inovasi Pelayanan Publik dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0 di Kota Bandung*. *Jurnal Administrasi Publik*. Vol. 1 No. 1.

- Mulyana, D. (2003). Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Naufal, M. (2021, Februari 23). Dinkes DKI Klaim PSBB Mampu Tekan Kasus Aktif Covid-19 di Jakarta. Megapolitan.kompas.com. Diakses dari <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/02/23/10091611/Dink-es-dki-klaim-psbb-mampu-tekan-kasus-aktif-covid-19-di-jakarta?page=all#page2>.
- Nurwaesari, N. & S.A.E. Putri. (2020). Prosedur Isolasi Terkendali di Fasilitas Milik Pemprov DKI Jakarta. Smartcity.jakarta.go.id. Diakses dari <https://smartcity.jakarta.go.id/blog/594/prosedur-isolasi-terkendali-di-fasilitas-milik-pemprov-dki-jakarta>.
- Ode, Samsul (2020). Kepemimpinan Inovatif Kepala Daerah Di Era Pandemi Covid-19 : Studi Kasus Walikota Semarang, Hendrar Prihadi. *Journal Of Government* Vol.6 No.1
- Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia. (2021, September 09). Covid.go.id. Diakses dari <https://covid19.go.id/storage/app/media/Daftar%20Hotel%20Untuk%20Isolasi%20Mandiri/DKI%20JAKARTA%20-20DAFTAR%20HOTEL%20UNTUK%20ISOLASI%20MANDIRI%20UPDATE%2007.10.20.pdf>.
- Publikasi. (2021, April 27). Corona.jakarta.go.id. Diakses dari <https://corona.jakarta.go.id/id/publikasi>.
- Rahman, F. & J.S.R. Tarigan. (2020). Inovasi Pemerintahan: Menuju Tata Kelola Pemerintahan Daerah Ideal. Malang: Intrans Publishing.
- Rahman, N.A. (2005). El-Hikmah. *Jurnal Kependidikan dan Keagamaan*. Vol. 3
- Saubani, A. (2020, Mei 08). PSBB DKI Vs Operasi Industri yang Dikeluarkan Menperin. Republika.co.id. Diakses dari <https://www.republika.co.id/berita/qa0126409/psbb-dki-vs-izin-operasi-industri-yang-dikeluarkan-menperin>.
- Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. (2020). Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Pergub Nomor 33 Tahun 2020). DKI Jakarta: Penulis. Diakses dari [https://jdih.jakarta.go.id/uploads/default/produkhukum/PERGUB\\_NO.\\_33\\_TAHUN\\_20204.pdf](https://jdih.jakarta.go.id/uploads/default/produkhukum/PERGUB_NO._33_TAHUN_20204.pdf).
- Suryani, T. (2008). Perilaku Konsumen Implikasi pada Strategi Pemasaran. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Widaningrum, A. & W. Mas'udi. (2020). Tata Kelola Penanganan Covid-19 di Indonesia: Kajian Awal. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Winardi. (2010). Manajemen Perubahan. Jakarta: Raja Grafindo Media Group.